Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)
Volume 6, Number 3, Maret 2026
p-ISSN 2774-5147 ; e-ISSN 2774-5155

Pembacaan Psikogenealogis Atas Keputusan Pencanangan Demokrasi Terpimpin Presiden Sukarno

Muhammad Aufa Ramadhan Putera
Universitas Terbuka, Indonesia
Email: muhammadriley8@gmail.com

Keywords:
Sukarno;
Guided Democrac;
Psychoanalysis;
Genealogy;
Politic

Abstrak

This study aims to explore the psychological factors influencing Sukarno's political decision-making, particularly in the context of the implementation of Guided Democracy. As a revolutionary leader, Sukarno often made decisions that affected many people and the country. However, much of the research overlooks the psychological dimension in the decision-making process. This research uses the approach of psychogenealogy, combining psychoanalysis and genealogy, to uncover the psychological factors shaping his political decisions. Data was collected through an analysis of speeches, writings, and historical events involving Sukarno. The results show that Sukarno's political decisions were influenced by anxieties, narcissistic desires, and fantasies related to his identity as the Great Leader of the revolution. This study concludes that psychogenealogy offers new insights into understanding major decisions in Indonesia's history and suggests that similar research be conducted on other historical figures to examine the role of psychology in politics.

Kata Kunci:
Sukarno;
Demokrasi Terpandu;
Psikoanalisis;
Genealogi;
Politik

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pengaruh faktor psikologis dalam pengambilan keputusan politik Sukarno, khususnya dalam konteks penerapan Demokrasi Terpimpin. Sebagai pemimpin revolusioner, Sukarno seringkali membuat keputusan yang mempengaruhi banyak orang dan negara. Namun, banyak riset yang mengabaikan dimensi psikologis dalam proses pengambilan keputusan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan psikogenealogi, yang menggabungkan psikoanalisis dan genealogi untuk mengungkap faktor-faktor psikologis yang membentuk keputusan-keputusan politiknya. Data diperoleh melalui analisis terhadap pidato, tulisan, dan peristiwa sejarah yang melibatkan Sukarno. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan-keputusan politik Sukarno dipengaruhi oleh kecemasan, keinginan narsistik, dan fantasi yang terkait dengan identitas dirinya sebagai pemimpin besar revolusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa psikogenealogi dapat memberikan wawasan baru dalam memahami keputusan-keputusan besar dalam sejarah Indonesia dan menyarankan agar penelitian serupa dilakukan pada tokoh-tokoh sejarah lainnya untuk melihat peran psikologi dalam politik.

PENDAHULUAN

Sukarno, sebagai pendiri bangsa, seringkali kurang mendapat perhatian dalam dunia penelitian akademis di Indonesia. Dan sebagian besar sumber buku yang membahas dinamika politik di Indonesia dibuat oleh akademisi asing. Sehingga peristiwa politik dalam sejarah di Indonesia terbatas pada pengetahuan yang berlalu. Padahal, sangat penting untuk mempelajari masalah ini karena merupakan pembelajaran dan kesadaran akan kondisi sejarah Indonesia itu sendiri. Dan selain upaya sistematis untuk tidak jatuh ke dalam penyembahan berhala Sukarno, artikel ini dibuat demi pembacaan yang jelas, metodis dan ilmiah(Arifianto, 2019; Fossati et al., 2020; Hadiz & Robison, 2017; Mietzner, 2020; Warburton, 2016).

Tidak banyak sejarawan yang terbiasa menggunakan metode interpretasi pribadi berdasarkan model psikologis. Karena sejarah menuntut jawaban kronologi peristiwa dengan pelaku suatu peristiwa sehingga agar dapat dibaca secara berurutan, kronologi peristiwa sejarah juga perlu mencakup variabel interpretasi psikologis. Sukarno sendiri, yang namanya masih sering disebut-sebut sekarang, terutama saat kampanye politik. Memang berdampak besar karena sosoknya dalam wacana Simbolik masih besar, namun dari segi keilmuan masih kurang.

Sukarno memulai perjalanan politiknya dari tahun 1926. Meskipun sempat ditawari untuk bekerja di kantor sipil tetapi ia menolak dan malah memilih untuk menjadi politisi (Ham, 2009). Kemudian ia mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) (Ham, 2009) dan juga menulis pamflet yang menjadi ciri politiknya, yaitu Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme yang akan mewarnai model politiknya di hari-hari untuk meningkatkan karir politiknya.

Sukarno muda itu sudah gemar membaca berbagai hal tentang dunia politik, dan ia juga dihadapkan pada banyak gagasan revolusioner seperti membaca buku tentang komunisme yang membentuk keyakinannya bahwa Indonesia harus memiliki tujuan untuk menyambut kemerdekaan. Berbeda dengan Hatta atau Syahrir yang terpapar ide-ide barat karena belajar di luar negeri, Sukarno yang belajar di Indonesia lebih dekat dengan gagasan yang menurut Sukarno sendiri khas Indonesia.

Dalam makalah ini, kami mencoba mengkaji bagaimana sebuah keputusan, terutama dari Sukarno, dibuat berdasarkan apa yang dialaminya, dan metode psikogenealogis ini, yang masih belum banyak digunakan, adalah alat untuk melihat hal ini. Cara ini diciptakan oleh Hizkia Yosie (Kedaulatan, 2014) dalam bukunya Asal Usul Kedaulatan. Metode ini mengeksplorasi jiwa dan kesadaran seseorang menggunakan kombinasi metode psikoanalitik dan genealogi.

Genealogi adalah suatu sistem pembacaan yang mana merupakan pembatasan ranah diskursus akan suatu periode. Dan dalam hal ini metode Yosie menggabungkan keduanya sehingga menjadi pembacaan secara psikoanalisis atas diskursus yang bertebaran di suatu periode. Sehingga nama metodenya adalah psikogenealogi. Dan dengan metode tersebut akan ditelusuri bagaimana kesadaran seorang Sukarno dalam membuat sebuah keputusan yang pastinya berpengaruh ke banyak orang.

Terlebih Sukarno sendiri bisa dikatakan seorang raja di Indonesia karena berhasil memilik pengaruh besar di rakyat dan piranti politik lainnya. Menurut Ong Hok Ham (2009) bahkan sebelum proklamasi pun Sukarno telah bisa dianggap sebagai seorang raja dan berusaha untuk membuat negara di dalam negara Hindia Belanda. Dikarenakan sudah memiliki pengaruh yang besar.

Sehingga dengan begitu, dalam menelisik perkembangan di Indonesia, tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Sukarno, karena pengaruhnya yang begitu besar, jadi tesis bahwa negara merupakan bentuk orang yang besar adalah bisa terpakai apalagi dalam kasus Sukarno karena pengaruhnya di Indonesia saat itu.

Sama seperti tokoh revolusioner lainnya di berbagai belahan dunia lain, yaitu tokoh yang melakukan revolusi menjadi sosok besar yang bahkan bisa dianggap menjadi pemimpin dengan pengaruh dan kekuasaan yang besar karena mengarahkan dan mengatur banyak hal. Seperti Lenin atau Mao yang menjadi pemimpin dengan berbagai idenya digunakan untuk tujuan negara baru yang mereka bangun.

Pemimpin revolusi dari berbagai belahan dunia lain juga melakukan banyak hal dengan kemampuan mereka dalam membuat tulisan, membuat statement atau pidato. Dan kerja mereka mendidik, mengarahkan, serta mengatur negara adalah pengaruh yang biasanya lekat akan sosok figur revolusi ini. Sama seperti Sukarno yang juga melakukan hal-hal tersebut.

Demokrasi terpimpin disini merupakan hal yang dianggap Sukarno sebagai sebuah hal baru untuk bukan saja Indonesia melainkan dunia, sesuai ciri khas Sukarno yang dipengaruhi oleh gerakan Asia lain melawan kolonialisme, seperti Gandhi dengan model gerakan yang bahkan sama sekali tidak menggunakan pertentangan kelas seperti Bolshevik ataupun Maois, tetapi dengan menggunakan paham agama. Dan ini mempengaruhi Sukarno sangat, sehingga dia juga coba untuk membuat padanan konsep untuk Indonesia itu sendiri.

Dan pemilihan masalah mengenai Demokrasi Terpimpin adalah karena Demokrasi Terpimpin merupakan fase dimana Sukarno menerima kekuasaan yang sangat besar serta sebuah usaha untuk mencanangkan model politik yang bersifat Indonesia. Dimana dia menentang keras akan demokrasi liberal dari barat, dan alternatif model politik lain biasanya dari komunis, sehingga berdasarkan inspirasi itu Sukarno kemudian membuat paham yang berdasarkan pemahamannya berciri keindonesiaan.

Dalam konteks Sukarno, interpretasi psikologis ini penting, mengingat tokoh ini seringkali dipandang sebagai simbol politik yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dalam kajian ini, Sukarno tidak hanya dilihat sebagai figur historis, tetapi juga sebagai individu dengan kecemasan, keinginan, dan ketakutan yang memengaruhi pengambilan keputusan politiknya, terutama dalam konteks pembentukan Demokrasi Terpimpin. Penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan pendekatan psikogenealogi, yang belum banyak diterapkan dalam penelitian sejarah Indonesia.

Kebaruan yang ditawarkan oleh penelitian ini adalah penggunaan metode psikogenealogi, yang menggabungkan psikoanalisis dengan analisis genealogi untuk mengeksplorasi faktor psikologis di balik keputusan-keputusan penting yang dibuat oleh Sukarno. Metode ini memberikan wawasan lebih dalam mengenai dinamika kejiwaan tokoh sejarah dan bagaimana faktor tersebut berperan dalam membentuk keputusan politik yang berdampak luas. Konsep ini juga menantang pendekatan tradisional dalam kajian sejarah yang seringkali mengabaikan kompleksitas psikologis tokoh-tokoh besar dalam sejarah.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh mengenai alasan psikologis yang mendasari keputusan Sukarno, khususnya dalam mengusung konsep Demokrasi Terpimpin, yang menjadi puncak dari perjuangannya untuk membentuk sistem politik yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa itu. Dengan pendekatan psikogenealogi, penelitian ini akan menelusuri bagaimana pengalaman-pengalaman masa kecil Sukarno, ideologi yang dia anut, serta peristiwa-peristiwa besar dalam hidupnya, membentuk pandangan politik dan keputusan-keputusan strategis yang dia ambil. Ini adalah upaya untuk memberikan dimensi baru dalam memahami pengaruh Sukarno terhadap sejarah politik Indonesia.

Manfaat dari penelitian ini sangat luas. Pertama, bagi kajian sejarah Indonesia, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih holistik dalam memahami dinamika politik masa lalu, dengan memasukkan aspek psikologi yang selama ini sering terabaikan. Kedua, bagi studi psikologi politik, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori-teori psikologi dalam konteks sejarah dan politik, khususnya dalam menjelaskan perilaku

pengambilan keputusan oleh individu dengan pengaruh besar. Terakhir, penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pemimpin politik masa kini, yang dapat melihat bagaimana pengaruh faktor psikologis dalam menentukan kebijakan yang berdampak pada banyak orang.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor psikologis yang membentuk kebijakan Sukarno, diharapkan dapat tercipta interpretasi yang lebih akurat mengenai peranannya dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam meluncurkan Demokrasi Terpimpin yang menjadi dasar dari banyak perubahan politik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi membuka diskusi lebih lanjut tentang peran psikologi dalam memahami dinamika kekuasaan dan kebijakan politik di negara berkembang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan untuk bidang sejarah, tetapi juga untuk bidang ilmu politik dan psikologi.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam mengisi celah yang masih ada dalam kajian tentang Sukarno dan kebijakan politik Indonesia, serta memberikan perspektif baru tentang bagaimana faktor psikologis dan keinginan individu dapat memengaruhi keputusan-keputusan besar dalam sejarah negara.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan di sini menggunakan metode kualitatif berbasis psikogenealogi. Psikogenealogi yang merupakan kombinasi dari psikoanalisis dan genealogi menawarkan pembacaan gejala seseorang yang berpengaruh karena mempengaruhi orang banyak, ini adalah metode yang dipilih berdasarkan fakta bahwa banyak hal yang perlu dimasukkan sebagai variabel yang merupakan variabel manusia, menurut tesis utama bahwa negara adalah orang yang hebat. Dan dengan menggunakan psikoanalisis, yang merupakan investasi emosional dan fantasi sebagai pembentukan alam bawah sadar, membawa pemahaman tentang narasi pribadi (Frosh, 2019; Friend, 2003).

Sampel

Penelitian dilakukan pada kajian sistematis berbagai peristiwa politik sebelum apa yang disebut demokrasi yang dipimpin oleh Sukarno dan deklarasinya. Sehingga periodisasi literatur dari semua wacana yang berkaitan dengan demokrasi terbimbing, baik secara sadar maupun tidak sadar, keberadaannya dijadikan sumber utama sampel penelitian. Jadi bukan hanya apa yang dilakukan Sukarno tetapi apa yang terjadi di sekitar Sukarno juga ketika ia memiliki pengaruh sebagai pemegang kekuasaan.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah dengan membaca dengan cermat semua wacana seputar Indonesia di era pra-demokrasi. Pengamatan mendalam terhadap setiap ucapan, kata, huruf, dan intonasi dipelajari untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang gejala yang dapat diketahui. Sumber data dikumpulkan dari berbagai tulisan tentang politik Indonesia sebelum demokrasi terpandu, dan juga pernyataan Sukarno sebagai objek penelitian.

Analisis Data

Berikut ini akan terungkap metode yang digunakan berdasarkan penjelasan Yosie tentang cara mengungkapkan gejala. Konsep yang digunakan sebagai acuan untuk membaca gejala di sini didasarkan pada metode yang telah ditelurkan oleh Yosie berdasarkan

psikoanalisis Lacanian. Penjelasan awal adalah bahwa perjalanan subjek untuk menjadi "aku" adalah perjalanan yang melewati fase Nyata, Imajiner, dan Simbolik (Polimpung, 2014). Di mana dalam fase nyata tidak ada bahasa karena bayi puas, maka fase imajiner adalah bahwa ada cermin yang memuaskan diri, dan simbolis adalah fase di mana bahasa telah memberikan pengaruhnya dan bahwa subjek akan selalu terguncang.

Gemetar dan narsisme, dalam subjek Lacanian, setiap subjek selalu terguncang karena makna selalu tergelincir, tetapi subjek mendambakan perbudakannya pada Simbolis atau bahasa karena dia membutuhkan Simbolis untuk berpartisipasi dalam kenyataan. Dan narsisme adalah keinginan untuk bertahan hidup di mana subjek ingin dicintai, dan inilah yang diperoleh realitas Simbolis dan oleh karena itu dengan membuat penanda subjek selalu memasuki rantai Simbolis karena mereka diberi tempat olehnya.

Kecemasan adalah reaksi terhadap kehilangan (Polimpung, 2014). Dimana ketakutan subjek yang merasa bahwa objek keinginannya bisa hilang menyebabkan kecemasan. Yang akan menjadi diskusi sentral dalam pembacaan gejala Sukarno nanti. Faktanya, objek kecemasan ini selalu menghilang sehingga gambar imajiner selalu muncul sebagai reaksi terhadap kecemasan ini dan mencapai tingkat kenyamanan.

Menurut Yosie (2014), gejala adalah manifestasi simbolis dari keutuhan imajiner yang mustahil. Efek normal dari realitas yang mampu dihasilkan oleh gejala adalah hasil dari upaya simbolis untuk membuat Nyata "dapat ditoleransi" dan tidak perlu dipertanyakan oleh subjek yang menghuni realitas itu. Tetapi itu tidak berarti bahwa gejalanya adalah kebohongan, kebenarannya adalah bahwa kebenaran adalah ketidakmungkinan untuk realitas simbolis, kebenaran adalah kategori Nyata yang selalu menolak simbolisasi. Jadi gejalanya adalah satu-satunya cara agar kebenaran "dipahami."

Dalam metode psikogenealogis, terdapat keinginan narsistik yang menjadi alat analisis, yaitu abjeksi yang dikonseptualisasikan oleh Judith Butler dan Julian Krsiteva di mana subjektivitas selalu mengikuti abjeksi atau pengecualian. Dalam hal ini, dalam membentuk realitasnya dalam elemen yang tidak diberi tempat sehingga ini akan menjadi konsep yang digunakan mengenai keinginan narsistik abjeksi ini. Ketertarikan dalam penelitian ini adalah bahwa "Ada skandal antara subjek dan gejalanya untuk terus-menerus menyangkal abjek demi kebaikan bersama—subjek dan realitasnya (Polimpung, 2014)".

Dengan berbagai konsep di atas, akan dilakukan kajian tentang keadaan jiwa Sukarno. Mulai dari apa kecemasannya, apa fantasinya, apa yang dia singkirkan demi pembentukan diri yang lengkap. Serta cermin subjektivitas yang membuatnya memiliki rasa integritas diri, dan ini juga yang seiring dengan kecemasan karena tanpa perasaan integritas diri menurut cermin subjek merasa gelisah. Dalam pembagian pembahasan akan menjadi dua tahap, yaitu, karakteristik Sukarno, fase sebelum ada ekspresi demokrasi yang dipimpin Sukarno yang diumumkan kepada semua pihak dan mengapa ia mengungkapkannya dan apa yang terjadi setelah pengungkapan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Sukarno

Berbeda dengan tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia lainnya, seperti Hatta dan Syahrir di mana mereka juga merupakan pemikir ideologi nasional. Sukarno dididik selama hidupnya di Indonesia saja, sementara Hatta dan Syahrir memiliki pengalaman belajar di luar negeri dan bahkan menghadiri banyak konferensi politik di luar negeri. Sehingga memiliki dasar

pandangan ideologis yang lebih barat-barat.

Sementara itu, Sukarno memiliki lebih banyak pengetahuan bahasa Indonesia karena tidak memiliki pengalaman sebagai mahasiswa sekolah asing. Tetapi Sukarno dihadapkan pada banyak gagasan nasionalisme dan revolusi sejak ia masih menjadi mahasiswa di THS dan tinggal di tempat Tjokroaminoto mengajarnya. Sukarno juga ikut serta dalam organisasi nasional yang saat itu juga sedang dibangun. Sikap Sukarno terhadap kebaruan revolusioner ditunjukkan dalam organisasi pemuda Jong Jawa bagian Budi Utomo di mana ia menolak menggunakan kromo Jawa atau bahasa halus, hal ini menunjukkan dirinya sebagai orang yang menolak elitisme (Ham, 2009).

Kemudian Sukarno melanjutkan pendidikan universitasnya di Bandung di mana ia membentuk kelompok belajar yang berisi mahasiswa politik negara. Setelah itu ia ditawari untuk menjadi PNS yang ia tolak dan lebih memilih untuk membangun partai, yaitu Partai Nasional Indonesia, di mana setelah sejak usia muda dihadapkan pada gagasan kebangsaan dan revolusi kemerdekaan serta turut serta dalam organisasi pemuda berbasis nasional ia langsung ikut serta membangun kesadaran dan perjuangan nasional.

Selama kegiatan partainya, Sukarno sering membuat tulisan untuk dipublikasikan di media massa atau memberikan pidato untuk menarik massa. Salah satu tulisannya yang terkenal di masa-masa awal ketika ia berada di jalur karir sebagai politisi nasionalis adalah Nasionalisme, Marxisme, dan Islamisme. Dalam pengalaman belajarnya, ia memposisikan dirinya bukan sebagai seorang revolusioner seperti Mao atau Lenin, ia lebih memilih menggabungkan aspek dari berbagai hal untuk membuat konsepsi baru, dan juga dipengaruhi oleh gerakan Gandhi di India, ia melihat bahwa Indonesia membutuhkan kekuatan massa agama untuk tujuan persatuan nasional, oleh karena itu karena ketiga komposisi kekuasaan politik Indonesia bermuara pada ketiga ideologi ini, Sukarno mencoba memasukkannya secara konseptual ke dalam tulisan.

Namun dalam tujuannya, Sukarno sering mengulangi bahwa tujuannya masih merupakan bentuk negara yaitu sosionasionalisme dan sosiodemokrasi di mana tidak ada kapitalisme dan imperialisme di dalamnya (Sukarno, 1965, 2001, 2016). Hal ini menandakan bahwa jalan Sukarno tidak menyimpang dari gagasan yang dipelajarinya, yaitu bahwa anti-kapitalisme adalah salah satu tujuannya.

Hatta sendiri mengatakan bahwa ideologi Sukarno terlalu "Sukarno" karena itu adalah pemahaman yang dibentuk oleh Sukarno sendiri, seperti pemahaman kelas/marhaen dimana dikatakan bahwa ia bertemu dengan seorang petani bernama Marhaen yang memiliki tanah dan alat pertanian tetapi penghasilannya kecil. Dan dari situ Sukarno membuat konsep bahwa di Indonesia ada marhaen karena kelas proletar masih terlalu sedikit jumlahnya. Karakteristik seperti ini nantinya akan menemani Sukarno di mana ia suka membuat hal-hal yang tampak baru dan khas Indonesia. Dan yang juga khas Sukarno adalah bahwa ia mengaku sebagai seorang romantis yang lebih suka merumuskan tujuan dan mengartikulasikan nilai-nilai daripada masalah ekonomi atau administrasi tertentu (Feith, 1995).

Mengetahui latar belakang Sukarno seperti ini untuk tujuan mengetahui cermin subjektif apa yang dimiliki Sukarno sehingga ia memiliki karakteristik tertentu. Dalam kasus ini, contoh dari buku metode Yosie (2014) adalah bahwa para Raja di Eropa dihadapkan pada ide-ide individu otonom yang tercerahkan yang memiliki rasio dan dapat berpikir sendiri, sementara Gereja tidak menyukai itu dan lebih berpegang teguh pada pedoman keyakinan mereka. Karena berbagai peristiwa, para Raja yang merasa telah kehilangan otonomi dan

menjadi gelisah, kemudian berkumpul dan membuat perjanjian bahwa mereka akan menghormati otonomi negara lain. Di sini cermin individu otonom adalah cermin para Raja dan itu kemudian menciptakan kecemasan ketika kehilangannya.

Sukarno dalam hal ini memiliki cermin pemahaman atau ideologi tentang revolusi kemerdekaan dengan adanya banyak gerakan revolusioner dan juga gerakan kemerdekaan di negara-negara terjajah. Dari sana ia mengkonseptualisasikan pemahamannya sendiri untuk tujuan perjuangan. Tidak seperti Raja-raja di Eropa yang sebelumnya memiliki kekuasaan dan hanya gereja saingannya, Sukarno di sini memiliki keberanian untuk bertarung.

Namun menurut Ong Hok Ham (2009) bukan berarti kemerdekaan Indonesia hanya karena Sukarno, jadi kalau tidak ada Sukarno, tidak ada kemerdekaan, tidak seperti itu. Namun memang hasil perjuangan Sukarno dengan dinamika politik saat itu, ia menjadi proklamir kemerdekaan. Dan kemudian ia mendapat julukan Pemimpin Besar Revolusi, Penghubung Lidah Rakyat, Panglima Tertinggi, dan lain-lain.

Tentu saja, hal ini juga menambah keterikatan realitas simbolis pada Sukarno yang menerima gelar sebagai tokoh besar di Indonesia. Dan juga kekhasannya dalam selalu mencari ciri khas untuk kasus negara Indonesia juga tidak dapat dikesampingkan karena Sukarno sendiri mencoba menjadikan Indonesia istimewa sehingga berbagai konsep berbeda yang digunakan Sukarno dengan alasan bahwa itu adalah ciri khas Indonesia. Seperti jika Lenin dan Mao menggunakan konsep kelas dan kesatuan satu partai dalam satu kelas proletar dan petani untuk kekuasaan.

Untuk itu, dapat dikatakan bahwa Sukarno adalah seorang pemimpin populis, di mana ekspresi politiknya untuk sejumlah besar orang bukan kelas tertentu seperti konsep marhaennya yang menyasar rakyat jelata, dan ini juga sering berubah, seiring dengan perkembangan gerakan kemerdekaan dan perkembangan politik Indonesia. Seperti sistem ekonomi gotong royong yang ia luncurkan di masa depan dengan menggunakan alasan ekonomi khas Indonesia dimana orang kaya membantu orang miskin. Namun itu karena kondisi ekonomi Indonesia membutuhkan kelas borjuis saat itu sesuai dengan program kabinet. Sehingga mungkin terjadi kontradiksi antara masa lalu sebelum kemerdekaan dan sesudahnya, namun dengan tujuan untuk mengikuti perkembangan gejolak ekonomi politik agar negara terus berjalan.

Kondisi Politik Sebelum Demokrasi Terpimpin Terungkap

Setelah kemerdekaan Indonesia, banyak guncangan yang membahayakan nasib republik Indonesia yang baru. Dan juga agresi militer dari Belanda dan sekutu mereka sendiri yang menciptakan ketidakstabilan sosial di Indonesia setelah kemerdekaan. Baru kemudian pada tahun 1949 ada kesepakatan yang disebut Konferensi Meja Bundar (KMB) di mana Belanda mengakui Indonesia dengan syarat bentuk negara Indonesia adalah negara federal atau serikat negara. Dan baru pada tahun 1950 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan (Friend, 2003).

Menurut Benedict Anderson (seperti dikutip dalam Theodore Friend 2003). Hal-hal seperti perjanjian KMB mengakibatkan Indonesia mau tidak mau harus menjalani sistem politik demokratis liberal, bukan karena keinginan Sukarno atau partai lain, tetapi tidak ada alternatif untuk menjalankan demokrasi lain, karena pengaruh paksaan dari Belanda. Tetapi selama waktu itu dan sampai tahun 1966 Sukarno tetap menjadi presiden.

Sepanjang awal tahun setelah kemerdekaan Sukarno, dihadapi bahwa Indonesia harus bernegosiasi sesering mungkin, karena membutuhkan bantuan banyak pihak lain. Oleh karena

itu, keinginan Sukarno untuk membuat partai perintis tidak terpenuhi (Ham, 2009). Partai pionir ini merupakan bentuk model partai negara komunis yang sudah ada, di mana ada partai yang menyuntikkan kesadaran revolusioner untuk mempercepat laju kesadaran paradigma rakyat. Tetapi Sukarno tidak memiliki kesempatan untuk ini, dan politik sebagian besar masih dikendalikan oleh partai-partai berbasis agama. Belum jelas apa itu partai perintis Indonesia, namun ada niat ke arah ini berdasarkan Ong Hok Ham.

Menurut Herbert & Castles, (1970), ada dua jenis politisi pada masa pasca kemerdekaan, yaitu pengambil solidaritas dan administrator. Sukarno lebih condong ke arah pembuat solidaritas dan seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa ia lebih suka menciptakan tujuan dan mengartikulasikan nilai-nilai daripada masalah teknokratis lainnya. Dan Hatta lebih cenderung ke administrator, oleh karena itu ia ditunjuk sebagai pemimpin kabinet pertama.

Kabinet Indonesia memang tidak selalu bertahan lama di era demokrasi liberal yang telah ditandai sejak 1949 karena kesepakatan KMB. Pada kabinet pertama yang dipimpin oleh Hatta, permasalahan yang muncul adalah konsolidasi politik, penyatuan daerah di mana ada keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia timur pada saat itu, dan juga pendidikan prajurit karena harus masuk ke masyarakat sipil di Indonesia, namun pada akhirnya kabinet ini dibubarkan dan tidak bertahan terlalu lama (Iman, 2007). Kabinet yang dipimpin Hatta tidak menggunakan slogan-slogan Marxis karena mereka lebih merupakan administrator, sehingga tujuan mereka adalah membuat keputusan yang terencana untuk pembangunan ekonomi bahkan dengan membangun kelas kapitalis di Indonesia.

Kemudian digantikan oleh Kabinet Natsir dari tahun 1950-1951. Selama periode ini, rencana ekonomi dibuat serinci mungkin (Iman, 2007). Namun meski begitu, kabinet ini tidak bertahan lama dan digantikan oleh Kabinet Sukiman dari tahun 1951-1952. Di sini, yang awalnya pada periode Hatta sikap anti-Belanda sering ditampilkan, pada periode ini sikap anti-Amerika lebih sering ditampilkan. Dan oleh Kabinet Sukiman, uang dituangkan ke usaha kecil dan juga pembangunan daerah.

Setelah Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo muncul dari tahun 1952-1953. Selama periode ini, ketegangan antara PNI dan Masyumi meningkat, dengan perbedaan pendapat. Dan selain membuka kembali negosiasi dengan Amerika Serikat, mengapa bergantung pada Amerika Serikat, karena Indonesia membutuhkan dana investasi untuk pembangunan. Pada saat ini, nama buruk yang didapat PKI karena peristiwa Madiun 1948 membuat PKI berusaha memperbaiki hubungannya dengan partai lain seperti partai nasionalis PNI. Berbeda dengan kabinet sebelumnya di mana PKI mengambil sikap sebaliknya (Iman, 2007).

Pada masa Kabinet Wilopo muncul kecenderungan tentara untuk membenci partai, seperti yang ditulis Nasution yang menjelaskan persaingan historis antara partai dan tentara (Faith, 2007). Dan ada juga tokoh militer lainnya yang menginginkan pembubaran parlemen karena merasa menciptakan ketidakstabilan akibat persaingan antar partai, dan juga kabinet yang tidak bisa membuat rencana untuk dilaksanakan dalam jangka panjang. Dan ini dijawab oleh Sukarno jika dia mau mendiskusikannya dengan kabinet. Dapat dilihat bahwa ada persaingan untuk mendapatkan pengaruh pada periode ini antara tentara dan partai.

Oposisi dari tentara mengembun menjadi gerakan 17 Oktober, di mana kecenderungan separatis dimulai. Dan hal ini membuat PNI berhasil mengambil keuntungan dari ketidakstabilan dengan membuat perdana menteri dari PNI menyelesaikannya. Dan PKI dan PNI semakin dekat di periode ini. Kemudian PKI tumbuh lebih kuat dan Masyumi juga pecah dan partai NU muncul saat ini. Kondisi tentara mengurangi pengaruhnya terhadap kabinet, dan

ini juga memperkuat posisi Sukarno (Iman, 2007).

Kabinet I Ali Sastromidjojo 1953-1955. Selama periode ini, pemerintah mengaku berhasil menenangkan dua kutub ekstrem di PKI dan Masyumi (Iman, 2007). Saat ini, Sukarno dianggap oleh partai lain telah memihak salah satu partai, yaitu PNI, yang membuat partai lain tidak lagi menganggapnya sebagai "Bapak Negara" (Iman, 2007). Dan Sukarno juga memperkuat pengaruhnya di tentara dengan memasukkan orang-orang pro-Sukarno ke dalam posisi di tentara.

Kabinet Burhanuddin Harahap 1955-1956. Dan itu masih terjadi, yakni kabinet tidak bertahan lama. Dan sekarang, pada kabinet Burhanuddin, gerakan 17 Oktober yang mengguncang keputusan apakah perwira yang jabatannya dicabut dapat dikembalikan, dan ini nantinya akan menciptakan pergolakan lain, yang disebut pergolakan daerah. Nasution juga membuat pernyataan bahwa dia telah salah mengabaikan pengaruh partai sipil.

Kabinet Kedua Ali Sastromidjojo 1956-1957. Di sini ketidakpuasan terhadap pemerintah mulai muncul, dan banyak pihak yang mengalamatkannya kepada Sukarno dan Hatta. Kemudian muncul klik sepasang orang yang berpartisipasi dalam gerakan 17 Oktober, yaitu Simbolon-Lubis, di mana mereka kemudian memilih untuk mendukung Masyumi dan khususnya PSI dan ingin melakukan kediktatoran militer (Iman, 2007). Dan di sinilah masa jabatan Sukarno untuk mengubur partai muncul dan juga penolakan Sukarno sendiri terhadap demokrasi liberal yang mengatakan bahwa 50% plus satu adalah suara pemenang (Herbert Faith, 1970). Dan ada gerakan separatis berbasis regional seperti di Sumatera yang disebut PRRI.

Terlihat bahwa stabilitas yang diinginkan tidak datang pada periode setelah kesepakatan KMB. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa selalu ada ketegangan antara Sukarno, partai, dan tentara. Ketiga pihak selalu bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Dan tentukan pilihan untuk berpihak kepada siapa dan mengapa. Sukarno diberi tempat sebagai salah satu partai di sini karena Sukarno memiliki agenda tersendiri untuk stabilitas dan sebagai pengatur segala sesuatu.

Tabel 1. Perbandingan keinginan antar pihak

	Sukarno	**Partai-partai**	**Tentara**
Sumber Kecemasan	Ketidakstabilan politik dan ekonomi (ekonomi tidak berkembang, separatisme muncul, partai-partai berselisih satu sama lain)	Sengketa ideologis dan kekuasaan dengan pihak lain	Ingin memperkuat pengaruh
Fantasi ideal imajiner (objek A)	Seorang pemimpin besar revolusi yang membawa kemakmuran	Dominasi ideologis	Dominasi kekuasaan
Cermin	Ide-ide nasionalis revolusioner	Ideologi masing-masing	Memiliki kekuatan
Mode Perjuangan	Atur dan buat sistem dengan orang-orang pilihannya sesuai dengan perhitungannya	Bersaing dengan mendekatkan diri dengan partai lain atau menjadi oposisi partai lain selain menyebarkan pengaruh kepada warga sipil	Menciptakan tentara yang dapat mempengaruhi publik dan pemerintah

Sumber: Faith, 2007; Iman, 2007; Ham, 2009

Munculnya Demokrasi Terpimpin

Bukan kebetulan bahwa Sukarno mengeluarkan kata-kata "Mari Mengubur Partai" setelah dia melakukan perjalanan ke Republik Rakyat Tiongkok yang saat itu dipimpin oleh Mao Tse Tung. Di sana Sukarno melihat bagaimana sistem politik di Tiongkok dari 28 Oktober 1956 hingga beberapa hari berikutnya. Dan kemudian pada tanggal 30 September 1956, Sukarno ditanya oleh Mao, "apa cita-cita bangsa Indonesia?". Dan Sukarno menjawab, "Bangsa Tionghoa dan Indonesia memiliki banyak kesamaan. Tujuan Anda adalah membangun dunia baru yang bebas dari eksploitasi, penderitaan, dan penindasan—dunia dengan kehidupan orang-orang yang bebas dan bahagia. Itulah tujuan kami." Dalam suasana yang ramah ini, Sukarno berkeliling Tiongkok selama 17 hari dan mengunjungi sejumlah kota (Bourchier, 2019; Diprose et al., 2019; Pepinsky, 2025; Quah, 2025; Utomo, 2017).

Isi pidato Sukarno "Mari Mengubur Partai" adalah "bahwa demokrasi saya bukanlah demokrasi liberal" (Herbert Faith, 1970). Bahkan, dia segera mengungkapkan kekagumannya terhadap Partai Komunis Tiongkok, dengan mengatakan "Situasi kami sehubungan dengan sistem partai, adalah gangguan total. Itu tidak sehat; itu harus sepenuhnya diubah. Terutama jika kita ingin membangun seperti orang lain di negara lain telah melakukan apa yang telah saya lihat, misalnya di Republik Rakyat Tiongkok, kita harus mengubah seluruh sistem partai." (Herbert Faith, 1970).

Dan pada saat itulah Sukarno mengeluarkan konsepsinya, yaitu Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin adalah konsep yang menurut Sukarno sesuai dengan jiwa pribadi Indonesia. Seperti sejak Sukarno masih muda dengan konsepsinya yang selalu dikatakannya sebagai bentuk khas Indonesia. Dan kemudian Sukarno semakin mengkonkretkan rencana ini di tahun-tahun mendatang.

Seperti pada 21 Februari 1957, Sukarno mengatakan "tidak ada kabinet yang bertahan terlalu lama. Dan setiap kabinet jatuh, krisis, dan harus diganti dengan kabinet lain ... Jadi akhirnya saya sampai pada keyakinan bahwa kita telah menggunakan satu sistem yang salah, satu gaya pemerintahan yang salah, yang kita sebut demokrasi Barat." (Sukarno, Demokrasi Terpimpin Rakyat Indonesia, 2001).

Konsepsinya kemudian terdiri dari pembentukan Dewan Nasional yang akan memberi nasihat kepada kabinet selama Demokrasi Terpimpin, parlemen tetap ada, kemudian kabinet harus diisi oleh orang-orang partai. Dan dia juga menolak oposisi dengan mengatakan bahwa itu adalah demokrasi liberal, sehingga model pemungutan suara tidak diinginkan dalam demokrasi terpandu. Dan Sukarno lebih menekankan pada musyawarah atau musyawarah.

Dewan Nasional terdiri dari kelompok-kelompok fungsional masyarakat. Di mana menjadi wakil langsung rakyat dalam konsepsi Sukarno. Seperti kabinet yang diperas dari parlemen, Dewan Nasional dari masyarakat secara langsung atau bisa dikatakan ahli atau tokoh publik.

Dan sepanjang tahun 1957-1959, Sukarno selalu mengungkapkan perkembangan konsepsinya tentang Demokrasi Terpingpin. Padahal, proyek politik ini dianggap oleh Sukarno sebagai proyek besar, karena ia mengatakan bahwa sekarang tidak lagi hanya ada dua blok, tetapi tiga, yaitu demokrasi liberal, komunis dan demokrasi terpimpin (Sukarno, Di Bawah Bendera Revolusi, 1965). Dalam hal ini, Sukarno berusaha menciptakan sesuatu yang baru di dunia dan khususnya khas Indonesia.

Dan dapat juga dikatakan bahwa cermin subjektivitas yang ada sejak Sukarno muda

masih ada. Dan dengan menanamkan sebagai Pemimpin Agung Revolusi, ini menambah realitas simbolis Sukarno yang membentuk integritasnya. Sehingga semua kegagalan pada periode sebelum disebutkan demokrasi terpimpin adalah sesuatu yang merusak citra integritas yang dirasakan Sukarno, seperti merusak citra Pemimpin Besar Revolusi atau juga citra Presiden sendiri, yang harus menjaga stabilitas dan pembangunan ekonomi serta kemakmuran seperti yang dijanjikannya. Untuk hal-hal yang dikecualikan dari ranah wacana universal simbolis Indonesia, saat peluncuran Demokrasi Terpimpin adalah karakter demokrasi liberal yang harus ditentang. Juga gagasan provinsialisme, insularisme dan federalisme (Sukarno, 2001) yang merusak gagasan persatuan Sukarno, katanya seperti "menggali kuburan dan mencoba menghidupkan kembali tulang-tulang orang yang dimakamkan 30 tahun lalu". Juga kunjungan Sukarno ke Tiongkok menambah kecemasan citra dirinya sebagai seorang revolusioner, dan ingin mengadopsi sistem komunis sebagai alternatif liberal-demokratis. Dapat dikatakan bahwa program Demokrasi Terpimpin ini merupakan manifestasi lebih lanjut dari gagasan diri ideal Sukarno, yaitu Pemimpin Agung Revolusi.

Tabel 2. Unsur-unsur Demokrasi Terpimpin

Bentuk Manifes	Program Demokrasi Terbimbing yang diluncurkan pada tahun 1956 dan secara resmi dilaksanakan pada tahun 1959 tidak ditandai dengan tidak adanya oposisi dan mendorong musyawarah—partai disederhanakan dan rakyat dapat masuk bahkan tanpa partai di lembaga baru yang telah dibentuk Sukarno
Isi Latent	Demokrasi Indonesia Mengakomodasi kegagalan demokrasi liberal dan memiliki harapan untuk demokrasi khas Indonesia Tanpa perlawanan, pembangunan terasa lebih cepat
Bawah sadar (Mekanisme sublimasi dari konten laten ke bentuk manifestasi)	Kecemasan Sukarno karena kabinet selalu gagal dan melihat bahwa negara dengan alternatif lain seperti komunis berhasil Ada gerakan tentara melawan pemerintah Separatisme regional Keinginan narsistik akan kenyamanan sebagai Pemimpin Besar Revolusi yang menggunakan cara khas Indonesia

Sumber: Sukarno, 2001; Faith, 1970; Utomo, 2017

Tabel 3. Struktur Gejala Deklarasi Demokrasi Terpandu

Komponen Struktural Wacana Lacanian	**Komponen Struktur Wacana Demokrasi Terpandu**
Gagasan universal (S2)	Kemajuan revolusioner yang dapat dicapai dalam Demokrasi Terpimpin Indonesia
Subjek Universal/Penanda Utama Keberadaan (S1)	Perpaduan demokrasi liberal dan model negara komunis, yaitu Demokrasi Terpimpin atau Demokrasi Terpimpin
Subjek/Subjek (S0)	Karakter demokrasi liberal yang memiliki oposisi Gerakan separatis regional atau menginginkan provinsialisme
Subjek Gegar Otak/Kecemasan Eksistensial (S)	Sukarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi yang merasa Indonesia telah menyimpang dari arahnya, dan kabinetnya tidak ada untuk umur panjang, banyak persaingan antar partai yang mengakibatkan banyak ketegangan dan serangan terhadapnya

Fantasi (a)	Identitas diri yang ideal sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia yang memberikan kenyamanan ontologis eksistensial

Sumber: Polimpung, (2014); Yosie, (2014)

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan psikogenealogi memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor psikologis yang memengaruhi pengambilan keputusan Sukarno, khususnya dalam meluncurkan konsep Demokrasi Terpimpin. Penelitian ini berhasil mengungkap bagaimana pengalaman pribadi, kecemasan, dan keinginan Sukarno, yang seringkali dipengaruhi oleh ideologi dan peristiwa-peristiwa besar dalam hidupnya, membentuk keputusan-keputusan politik yang berdampak luas bagi Indonesia. Dengan demikian, metode psikogenealogi, yang menggabungkan psikoanalisis dan genealogi, telah terbukti efektif dalam menggali dinamika kejiwaan tokoh sejarah. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk memperluas kajian ini dengan menerapkan pendekatan serupa pada tokoh-tokoh sejarah Indonesia lainnya guna memahami lebih jauh peran faktor psikologis dalam pengambilan keputusan politik, serta mengeksplorasi dampak psikologis jangka panjang dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada masa lalu.

DAFTAR PUSTAKA

Arifianto, A. R. (2019). Islamic campus preaching organizations in Indonesia: Promoters of moderation or radicalism? *Asian Security*, *15*(3), 323–342. https://doi.org/10.1080/14799855.2018.1461796

Bourchier, D. (2019). Two decades of ideological contestation in Indonesia: From democratic cosmopolitanism to religious nationalism. *Journal of Contemporary Asia*, *49*(5), 713–733. https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1590620

Diprose, R., McRae, D., & Hadiz, V. R. (2019). Two decades of Reformasi in Indonesia: Its illiberal turn. *Journal of Contemporary Asia*, *49*(5), 691–712. https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1637922

Feith, H. (1995). *Sukarno-Militer Dalam Demokrasi Terpimpin*. Pustaka Sinar Harapan.

Fossati, D., Aspinall, E., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Ideological representation in clientelistic democracies: The Indonesian case. *Electoral Studies*, *63*, 102111. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2019.102111

Friend, T. (2003). *Indonesia Destinies*. Harvard University Press.

Frosh, S. (2019). Psychosocial studies with psychoanalysis. *Journal of Psychosocial Studies vol 12* , 101-114.

Hadiz, V. R., & Robison, R. (2017). Competing populisms in post-authoritarian Indonesia. *International Political Science Review*, *38*(4), 488–502. https://doi.org/10.1177/0192512117697475

Ham, O. H. (2009). *Sukarno, Orang Kiri, Revolusi & G30S 1965*. Komunitas Bambu.

Herbert, F., & Castles, L. C. (1970). *Indonesia Political Thinking 1945-1965.* London: Cornell University Press.

Iman, H. (2007). *Penurunan Demokrasi Konstisional Di Indonesia*. Penerbitan Equinox.

Mietzner, M. (2020). Movement leaders, oligarchs, party barons and bureaucratic strongmen: Varieties of populism in post-Suharto Indonesia. *Asian Studies Review*, *44*(3), 422–439. https://doi.org/10.1080/10357823.2020.1787577

Pepinsky, T. B. (2025). Cleavages, institutions, and democracy in Indonesia: The 2024 elections in comparative perspective. *Asian Journal of Comparative Politics*, *10*(2), 1–20. https://doi.org/10.1177/18681034251349467

Polimpung, H. Y. (2014). *Asal Usul Kedaulatan*. Kepik.

Quah, N. (2025). An anatomy of worldmaking: Sukarno and anticolonialism from post-Bandung Indonesia. *American Journal of Political Science*, *69*(1), 1–18. https://doi.org/10.1111/ajps.12963

Sukarno. (1965). *Di Bawah Bendera Revolusi*. Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.

Sukarno. (2001). *Demokrasi Terpimpin Milik Rakyat Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Sukarno. (2016). *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I*. Banana Books.

Utomo, S. P. (2017). Indonesia, Tiongkok dan Komunisme, 1949-1965. *Indonesian Perspective*, *2*(1), 65–75.

Warburton, E. (2016). Jokowi and the New Developmentalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *52*(3), 297–320. https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1249262